p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Ketimpangan Pembangunan Pesisir dan Kerentanan Nelayan Tradisional: Studi Kasus di Kawasan Pantai Indah Kapuk 2

Coastal Development Inequality and the Vulnerability of Traditional Fishers: A Case Study of the Pantai Indah Kapuk 2 Area

***Ilham Maulana Bagaskara**

Sekolah Global Mandiri
Jl. Alternatif Transyogi KM. 6, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16965, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 15 Februari 2026
Perbaikan naskah: 15 Mei 2026
Disetujui terbit : 22 Juni 2026

*Korespodensi penulis:
Email: ilhambagaskara465@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v16i2.20754

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak pembangunan pesisir terhadap nelayan kecil di Jakarta Utara dengan menempatkan kawasan PIK 2 sebagai konteks utama transformasi ruang pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang diperkaya statistik deskriptif melalui analisis dokumen, tinjauan pustaka, observasi lapang, wawancara eksploratif, dan dokumentasi visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pesisir tidak hanya menghasilkan perubahan spasial, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi nelayan kecil melalui penyempitan ruang tangkap, meningkatnya biaya operasional, dan melemahnya kapabilitas rumah tangga nelayan. Reklamasi Teluk Jakarta diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp207,15 miliar per tahun, termasuk sekitar Rp94,71 miliar yang ditanggung nelayan tangkap. Pada tingkat komunitas, jumlah penduduk Salembaran Jati menurun sebesar 26,3% pada periode 2010–2024, dengan sekitar 10% warga terdampak penggusuran. Catatan lapang menunjukkan bahwa konsumsi solar nelayan meningkat dari 7–8 liter menjadi 15–20 liter per trip atau naik sekitar 87,5%–185,7%. Dengan asumsi 20 hari melaut per bulan, tambahan kebutuhan BBM mencapai 140–260 liter per bulan. Di sisi lain, mayoritas responden berpendidikan SMP–SMA dan sebagian belum memiliki BPJS, yang menunjukkan keterbatasan kapasitas adaptasi dan perlindungan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan pesisir di sekitar PIK 2 merupakan konsekuensi dari pembangunan yang cenderung memusatkan manfaat ekonomi pada kawasan investasi, sementara biaya ekologis dan sosial dialihkan kepada komunitas nelayan kecil. Oleh karena itu, pembangunan pesisir memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif melalui perlindungan ruang tangkap tradisional, pengukuran dampak sosial-ekologis berbasis operasional nelayan, penguatan perlindungan sosial, penyediaan pembiayaan adaptif, dan partisipasi bermakna masyarakat pesisir dalam tata kelola pembangunan.

Kata Kunci: PIK 2; nelayan kecil; disparitas sosial-ekonomi; reklamasi; kapabilitas; keadilan pesisir

ABSTRACT

This study examines the impacts of coastal development on small-scale fishers in North Jakarta by positioning the PIK 2 area as a major context of coastal spatial transformation. The research applies a descriptive qualitative approach enriched with descriptive statistics through document analysis, literature review, field observation, exploratory interviews, and visual documentation. The findings show that coastal development not only produces spatial transformation but also intensifies the socio-economic vulnerability of small-scale fishers through shrinking fishing grounds, rising operational costs, and declining household capabilities. The reclamation of Jakarta Bay is estimated to generate annual economic losses of Rp207.15 billion, including Rp94.71 billion borne by capture fishers. At the community level, the population of Salembaran Jati declined by 26.3% between 2010 and 2024, with around 10% of residents affected by eviction. Field findings indicate that diesel consumption increased from 7–8 liters to 15–20 liters per fishing trip, equivalent to an increase of 87.5%–185.7%. Assuming twenty fishing trips per month, additional fuel demand reaches 140–260 liters monthly. Most respondents were educated only up to junior and senior high school levels, while some lacked BPJS coverage, indicating limited adaptive capacity and weak social protection. This study argues that coastal inequality surrounding PIK 2 reflects a development model that concentrates economic benefits within investment-oriented coastal spaces while transferring ecological and social costs to small-scale fishers. Therefore, coastal development policies should adopt a more inclusive approach through the protection of traditional fishing grounds, operational-based socio-ecological impact assessments, strengthened social protection, adaptive financing schemes, and meaningful participation of coastal communities in development governance.

Keywords: PIK 2; small-scale fishers; socio-economic disparity; reclamation; capability; coastal justice

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir urban merupakan ruang tempat akumulasi modal, perubahan ekologis, dan kerentanan sosial berkelindan secara simultan. Pada konteks pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), merupakan pembangunan kawasan pesisir modern yang berjalan bersamaan dengan pemisahan spasial yang semakin tegas antara *enclave* berkapital tinggi dan kampung-kampung nelayan tradisional di pesisir Jakarta Utara–Tangerang. Oleh karena itu, persoalan utama bukan hanya apakah pembangunan

terjadi, melainkan siapa yang menikmati manfaatnya dan siapa yang menanggung biayanya.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tekanan tersebut telah hadir pada beberapa level. Shabrina (2025) mencatat penggusuran, relokasi, dan penurunan kualitas layanan dasar di Salembaran Jati. Muhartono *et al*. (2023) memperlihatkan bahwa nelayan kecil di Marunda bekerja dalam sistem one day fishing, sangat bergantung pada jaringan sosial untuk pembiayaan, dan sulit mengakses lembaga formal. Sementara itu, Ramadhan *et al*. (2016) menunjukkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta menimbulkan kerugian ekonomi tahunan yang besar bagi nelayan tangkap, pembudidaya kerang, dan tambak. Rangkaian bukti ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pesisir urban perlu dibaca sebagai persoalan struktural, bukan sekadar fluktuasi pendapatan individual.

Penelitian ini bertujuan menyusun naskah yang lebih kuat secara akademik dengan menambahkan statistik deskriptif, justifikasi kuantitatif, dan perbandingan yang lebih jelas antara perkembangan PIK 2 dan kondisi nafkah nelayan kecil. Secara khusus, artikel ini menjawab empat pertanyaan: (1) bagaimana megaproyek pesisir memproduksi segregasi spasial; (2) bagaimana kerentanan nafkah nelayan kecil tercermin dalam indikator kuantitatif; (3) bagaimana catatan lapang memperlihatkan kenaikan beban operasional dan penurunan kapabilitas; dan (4) apa implikasi kebijakan untuk pembangunan pesisir yang lebih adil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang diperkaya statistik deskriptif sederhana. Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, data sekunder dibaca dan dikodekan ke dalam dimensi segregasi spasial, nafkah dan pembiayaan, perubahan ekologis, serta kapabilitas-perlindungan sosial. Kedua, angka-angka penting dihitung ulang menjadi indikator komparatif, misalnya persentase penurunan penduduk, kenaikan kebutuhan BBM, perubahan omzet, dan skenario tambahan konsumsi solar bulanan. Ketiga, catatan lapang diposisikan sebagai bukti deskriptif-komparatif untuk memperlihatkan bagaimana tekanan struktural diterjemahkan ke dalam pengalaman sehari-hari nelayan kecil. Pada penelitian ini tidak menggunakan survei rumah tangga berskala besar, sehingga analisis statistik yang disajikan bersifat deskriptif, bukan inferensial. Dengan demikian, kekuatan artikel terletak pada triangulasi antara literatur ilmiah, data statistik resmi, dan bukti lapang yang terdokumentasi.

SEGREGASI SPASIAL DAN KONTRAKSI RUANG HIDUP

Segregasi spasial merupakan mekanisme awal yang membuka jalan bagi berbagai bentuk ketimpangan lainnya. Ketika ruang hidup menyempit, akses terhadap sumber penghidupan, layanan dasar, dan jaringan sosial ikut tergerus. Di Salembaran Jati, proses ini terdokumentasi dengan jelas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah penduduk turun dari 6.081 jiwa pada 2010 menjadi 4.479 jiwa pada 2024. Pengurangan sebesar 1.602 jiwa atau 26,3% dalam kurun waktu empat belas tahun. Shabrina (2025) mencatat bahwa sekitar 10% warga, atau kurang lebih 600 orang, terdampak langsung penggusuran pada periode 2013–2016. Penurunan populasi sebesar seperempat dalam satu dekade lebih bukan sekadar statistik demografis. Ini merupakan gambaran adanya pemutusan ikatan kewilayahan yang telah terbangun lintas generasi. Warga yang tersisa menghadapi ruang hidup yang semakin sempit dan terjepit di antara kawasan reklamasi baru. Keberadaan tembok pembatas setinggi sekitar lima meter yang memisahkan kawasan PIK 2 dengan permukiman nelayan sebagaimana didokumentasikan Shabrina (2025) menjadi simbol material dari pemisahan tersebut. Tembok itu bukan hanya batas fisik, melainkan juga batas sosial yang mempertegas siapa yang berhak atas ruang pesisir modern dan siapa yang terpinggirkan darinya.

Mengacu pada kerangka teoretis Harvey (2008) mengenai *"right to the city,"* fenomena ini dapat diterjemahkan sebagai produksi ruang yang mengutamakan sirkulasi modal dan nilai properti. Kawasan pesisir direkonfigurasi untuk menyambut investasi, hunian kelas menengah-atas, dan fasilitas komersial, sementara komunitas nelayan tradisional diperlakukan sebagai "hambatan" yang perlu direlokasi atau diabaikan. Segregasi spasial, dengan demikian, bukan konsekuensi tidak sengaja dari pembangunan, melainkan bagian integral dari logika akumulasi yang mendasarinya. Pemahaman ini penting karena segregasi spasial tidak berhenti pada pemisahan fisik semata. Ia menjadi titik awal bagi rangkaian tekanan berikutnya: ketika nelayan terdesak dari lokasi tangkap tradisional, mereka harus menempuh jarak lebih jauh dengan biaya lebih besar, yang pada gilirannya menggerus margin nafkah dan kapabilitas rumah tangga. Bagian-bagian selanjutnya akan mengurai mata rantai tersebut.Bukti paling jelas tentang segregasi spasial terlihat dari perubahan di Salembaran Jati. Jumlah penduduk yang tercatat turun dari 6.081 jiwa pada 2010 menjadi 4.479 jiwa pada 2024, atau berkurang 1.602 jiwa (26,3%). Penelitian yang sama juga menyebut sekitar 10%

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

warga terdampak penggusuran pada periode 2013–2016, yakni sekitar 600 orang. Angka ini penting karena memperlihatkan bahwa pembangunan PIK 2 tidak hanya menata lahan, tetapi juga mendorong restrukturisasi sosial-demografis yang nyata. Ketika ruang hidup mengalami penyempitan, akses warga terhadap identitas kewilayahan, layanan dasar, dan sumber penghidupan pun ikut tergerus.

Segregasi tersebut juga hadir dalam bentuk simbolik dan material. Shabrina (2025) mencatat keberadaan tembok pembatas setinggi sekitar lima meter yang mempertegas batas antara kawasan baru dengan warga sekitar. Dalam kerangka Harvey (2008), gejala ini dapat dibaca sebagai produksi ruang yang berpihak pada sirkulasi modal dan nilai properti, sementara biaya sosial dari penataan ulang ruang dialihkan ke kelompok berdaya tawar rendah.

KERENTANAN NAFKAH NELAYAN KECIL JAKARTA UTARA

Untuk memahami dampak pembangunan pesisir terhadap nelayan kecil, perlu terlebih dahulu dipetakan karakteristik dasar sistem nafkah mereka. Muhartono *et al*. (2023) menemukan bahwa nelayan kecil di Marunda, Jakarta Utara, beroperasi dalam pola one day fishing dengan waktu tempuh 1–3 jam menuju lokasi tangkap. Sebanyak 73% nelayan memiliki dua jenis alat tangkap, sementara 27% hanya memiliki satu. Mayoritas menggunakan jaring (70%) dan bubu udang (27%) sebagai alat tangkap utama.

Karakteristik ini memperlihatkan dua sisi, yaitu fleksibilitas dan kerentanan. Di satu sisi, nelayan kecil mampu beradaptasi dengan kondisi perairan dan musim melalui diversifikasi alat tangkap. Di sisi lain, skala usaha yang kecil, margin keuntungan yang tipis, dan ketergantungan pada perjalanan harian membuat mereka sangat sensitif terhadap perubahan kondisi operasional. Tidak ada ruang penyangga ketika biaya produksi meningkat atau hasil tangkapan menurun.

Kerentanan tersebut diperparah oleh posisi tawar yang lemah di rantai nilai perikanan. Pada komoditas rajungan, misalnya, harga di tingkat nelayan yang semula berkisar Rp75.000–80.000 per kg anjlok menjadi sekitar Rp17.000–22.000 per kg. Menggunakan nilai titik tengah, penurunan harga mencapai 74,8%, dari Rp77.500 menjadi Rp19.500 per kg. Fluktuasi harga setajam ini tidak dapat diantisipasi oleh nelayan kecil yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas penyimpanan, informasi pasar real-time, atau posisi tawar kolektif terhadap pedagang perantara. Kondisi praksis ini menjadi latar penting untuk memahami mengapa tekanan tambahan dari pembangunan pesisir berdampak begitu signifikan. Sistem nafkah yang sudah rentan menghadapi guncangan ganda: dari sisi pasar berupa volatilitas harga, dan dari sisi operasional berupa bertambahnya jarak tempuh menuju lokasi tangkap. Bagian berikutnya akan membuktikan secara kuantitatif bagaimana tekanan operasional tersebut termanifestasi dalam kenaikan biaya produksi.

KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL

Perubahan biaya operasional nelayan menjadi semakin terlihat ketika dianalisis dalam skenario aktivitas melaut bulanan. Berdasarkan catatan lapang, nelayan yang sebelumnya menghabiskan sekitar 7–8 liter solar per trip kini memerlukan 15–20 liter untuk sekali melaut. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan konsumsi bahan bakar, tetapi juga menggambarkan bergesernya



(a) (b)

Gambar 1. (a) Wawancara Lapangan dengan Responden Lokal di Atas Perahu Pada Kawasan Pesisir; (b) Kawasan Pesisir dengan Deretan Perahu dan Struktur Apung di Tepi Tanggul Beton, Berlatar Belakang Kawasan Urban.

ruang tangkap nelayan ke lokasi yang lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Mengacu pada aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan sehari-hari, perubahan tersebut menghasilkan konsekuensi ekonomi yang nyata. Pada asumsi konservatif 20 hari melaut per bulan, tambahan kebutuhan solar diperkirakan mencapai 140–260 liter per bulan (Tabel 1). Jika nelayan melaut hingga 24 hari per bulan, tambahan konsumsi BBM meningkat menjadi sekitar 168–312 liter per bulan. Dengan kata lain, aktivitas penangkapan ikan saat ini menuntut kebutuhan energi yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi sebelum perubahan kawasan pesisir berlangsung.

Temuan ini memperlihatkan bahwa tekanan terhadap nelayan kecil tidak selalu muncul secara langsung dalam bentuk hilangnya pekerjaan, tetapi dapat terjadi melalui perubahan bertahap pada struktur biaya produksi. Semakin jauhnya lokasi tangkap menyebabkan nelayan harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mempertahankan aktivitas penangkapan yang sama. Pada saat yang bersamaan, kemampuan rumah tangga nelayan untuk menjaga kestabilan pendapatan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara biaya operasional, hasil tangkapan, dan harga jual ikan di pasar. Maka peningkatan kebutuhan BBM tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan teknis operasional, tetapi juga sebagai indikator perubahan sosial-ekonomi di wilayah pesisir. Perubahan ruang pesisir secara tidak langsung membentuk ulang pola kerja nelayan, meningkatkan kebutuhan input produksi, dan mempersempit ruang adaptasi ekonomi rumah tangga nelayan kecil.

Implikasi ekonomi dari perubahan biaya ini, bahwa peningkatan konsumsi BBM sebesar dua kali lipat lebih sudah menunjukkan pelebaran biaya produksi yang substansial. Jika harga ikan tidak naik secara proporsional, disinilah letak benang merah yang menghubungkan segregasi spasial dengan penurunan kesejahteraan. Ketika ruang tangkap tradisional diambil alih untuk pembangunan, nelayan tidak serta-merta kehilangan mata pencaharian, tetapi mereka dipaksa beroperasi dalam kondisi yang jauh lebih berat. Beban pembangunan pesisir, dengan demikian, tidak menghilangkan nelayan secara fisik, melainkan menggerus daya hidup mereka secara perlahan melalui mekanisme pasar dan biaya produksi.

KERUGIAN EKONOMI REKLAMASI DAN KONTEKS SEKTOR PERIKANAN

Pada skala yang lebih luas, temuan lapang tersebut sejalan dengan estimasi ekonomi di Teluk Jakarta. Ramadhan et al. (2016) memperkirakan bahwa reklamasi menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp207.153.292.610 per tahun. Kerugian tersebut terdiri atas sekitar Rp94,71 miliar pada nelayan tangkap, Rp98,87 miliar pada pembudidaya kerang, dan Rp13,57 miliar pada pembudidaya tambak. Temuan ini memperkuat argumen bahwa beban pembangunan pesisir tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada kelompok yang hidup langsung dari sumber daya perairan.

Pada konteks statistik sektoral, Portal Satu Data KKP mencatat produksi perikanan tangkap DKI Jakarta sebesar 201.903 ton pada 2024, turun 4,10% secara *year-on-year*. Pada saat yang sama, Nilai Tukar Nelayan DKI Jakarta berada pada indeks

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Tekanan Pembangunan.

Indikator lapang	Sebelum	Sesudah	Perubahan	Keterangan
Konsumsi solar/trip	7–8 liter	15–20 liter	+7 sampai +13 liter; +87,5% sampai +185,7%	Tekanan utama berasal dari rute tangkap yang lebih jauh.
Rasio kebutuhan BBM	1,0x	2,0–2,5x	Titik tengah 2,33x	Setiap trip kini membutuhkan energi jauh lebih besar.
Tambahan kebutuhan BBM/bulan (20 trip)	-	140–260 liter	Kenaikan volume bulanan	Menunjukkan beban biaya yang persisten, bukan insidental.
Pendapatan nelayan kecil	Relatif lebih stabil	Menurun	Tidak tersedia angka nominal lapang	Kenaikan biaya operasi menjadi penjelas utama penyusutan margin.
Pendidikan responden lapang	-	Didominasi SMP–SMA	Kualitatif-deskriptif	Menunjukkan keterbatasan modal manusia formal.
Kepemilikan BPJS	-	Sebagian belum memiliki	Kualitatif-deskriptif	Perlindungan sosial belum memadai saat beban ekonomi meningkat.

Sumber: Catatan lapang penulis, diolah secara statistik deskriptif.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

111,81 pada Maret 2026. Secara konseptual, indeks di atas 100 menandakan bahwa secara agregat harga yang diterima nelayan masih lebih tinggi daripada harga yang dibayar. Namun, indikator rata-rata provinsi seperti ini tidak otomatis membatalkan temuan kemunduran kesejahteraan di level kampung nelayan. Justru, kesenjangan antara indeks agregat yang tampak "baik" dan catatan lapang yang menunjukkan penurunan pendapatan menegaskan adanya heterogenitas spasial dan sosial dalam pengalaman kesejahteraan nelayan.

KAPABILITAS, PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Pendekatan kapabilitas dari Sen (1999) membantu menjelaskan mengapa penurunan pendapatan tidak dapat dibaca secara sempit sebagai kekurangan uang semata. Berdasarkan hasil penelitian, responden nelayan didominasi tingkat pendidikan SMP–SMA, sementara sebagian belum memiliki BPJS. Dua informasi ini penting karena pendidikan memengaruhi kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar, diversifikasi pekerjaan, dan akses informasi, sedangkan jaminan kesehatan menjadi penyangga utama ketika rumah tangga berhadapan dengan pendapatan yang tidak pasti. Tekanan biaya operasional yang meningkat bertemu dengan modal manusia formal yang terbatas dan perlindungan sosial yang belum kuat. Konsekuensinya bukan hanya penurunan pendapatan jangka pendek, melainkan juga penyusutan kapabilitas untuk bertahan, berinvestasi, dan naik kelas secara ekonomi. Inilah alasan mengapa ketimpangan pesisir harus dipahami sebagai persoalan distribusi manfaat pembangunan sekaligus distribusi peluang hidup.

Keterbatasan pendidikan formal memengaruhi kemampuan untuk mengakses informasi pasar, memahami regulasi, melakukan diversifikasi pekerjaan, dan menavigasi birokrasi. Dalam konteks di mana sektor perikanan menghadapi tekanan ganda dari perubahan ekologis dan transformasi spasial, modal manusia menjadi kunci adaptasi. Nelayan dengan pendidikan terbatas cenderung memiliki pilihan yang lebih sempit ketika mata pencaharian utama mereka terancam. Sementara itu, ketiadaan jaminan kesehatan menempatkan rumah tangga nelayan dalam posisi yang sangat rapuh. Pekerjaan melaut memiliki risiko kecelakaan dan penyakit yang tidak rendah. Ketika anggota keluarga sakit dan tidak memiliki BPJS, biaya kesehatan harus ditanggung secara *out-of-pocket* yang dalam kondisi pendapatan yang sudah tergerus, dapat mendorong rumah tangga ke dalam perangkap kemiskinan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pesisir di kawasan PIK 2 telah menghasilkan disparitas sosial-ekonomi yang nyata antara kawasan investasi baru dan komunitas nelayan tradisional di Jakarta Utara. Integrasi antara sintesis literatur, statistik deskriptif, dan catatan lapang memperlihatkan bahwa ketimpangan tersebut tidak hanya tercermin pada perubahan spasial kawasan pesisir, tetapi juga pada meningkatnya kerentanan nafkah rumah tangga nelayan. Kontraksi ruang hidup, meningkatnya biaya operasional penangkapan, menurunnya margin usaha, serta melemahnya kapabilitas sosial-ekonomi menjadi indikator utama perubahan tersebut. Secara kuantitatif, penelitian ini mencatat penurunan jumlah penduduk Salembaran Jati sebesar 26,3%, penurunan omzet usaha warga hingga 80%, kerugian ekonomi reklamasi lebih dari Rp207 miliar per tahun, serta peningkatan kebutuhan solar nelayan sebesar 87,5%–185,7% per trip.

Temuan lapang menegaskan bahwa penurunan kesejahteraan nelayan kecil bukan sekadar persoalan fluktuasi pendapatan, melainkan konsekuensi struktural dari perubahan tata ruang pesisir yang memperbesar biaya produksi dan mempersempit akses terhadap sumber daya perikanan. Dalam perspektif kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pesisir yang berorientasi pada investasi memerlukan mekanisme perlindungan sosial-ekologis yang lebih kuat agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara biaya ekologis dan sosial dialihkan kepada masyarakat pesisir. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pesisir perlu diarahkan pada perlindungan ruang tangkap tradisional, pengukuran dampak sosial-ekologis berbasis aktivitas operasional nelayan, penyediaan kompensasi yang proporsional, penguatan jaminan sosial dan pembiayaan adaptif, serta penguatan partisipasi masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan pesisir dapat berlangsung secara lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Pada perspektif ekonomi politik pesisir, pembangunan PIK 2 dapat dipahami sebagai bagian dari proses rekonfigurasi ruang yang berorientasi pada akumulasi modal. Mengacu pada Harvey (2008), dinamika ini merepresentasikan accumulation by dispossession, yaitu proses ketika ruang dan sumber daya yang sebelumnya menjadi basis penghidupan masyarakat lokal dialihkan

untuk kepentingan investasi dan sirkulasi kapital. Pada konteks pesisir Jakarta Utara, proses tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk penggusuran fisik secara langsung, tetapi juga berlangsung melalui mekanisme yang lebih gradual dan struktural, seperti menyempitnya akses terhadap ruang tangkap tradisional, meningkatnya jarak tempuh melaut, serta bertambahnya biaya operasional penangkapan ikan. Dalam jangka panjang, perubahan ini mendorong marginalisasi sosial-ekonomi nelayan kecil karena ruang pesisir yang sebelumnya bersifat produktif bagi komunitas lokal berubah menjadi ruang dengan orientasi ekonomi yang lebih eksklusif.

Temuan mengenai kenaikan kebutuhan BBM dan penurunan margin nafkah nelayan juga memperkuat argumen dalam pendekatan ekologi politik mengenai terjadinya cost-shifting atau pengalihan biaya pembangunan. Manfaat ekonomi pembangunan pesisir cenderung terkonsentrasi pada aktor yang memiliki modal besar, seperti pengembang, investor, dan penghuni kawasan baru, sementara biaya ekologis dan sosialnya tersebar kepada kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas tawar lebih rendah. Dalam praktiknya, nelayan kecil menanggung biaya tersebut melalui bertambah jauhnya rute tangkap, meningkatnya kebutuhan energi untuk melaut, serta ketidakpastian hasil tangkapan akibat perubahan kondisi perairan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pesisir tidak hanya menghasilkan perubahan spasial, tetapi juga redistribusi risiko ekonomi yang cenderung tidak seimbang.

Pendekatan kapabilitas dari Sen (1999) selanjutnya membantu menjelaskan mengapa tekanan ekonomi tersebut berdampak lebih berat pada rumah tangga nelayan kecil. Kapabilitas individu atau rumah tangga untuk mengubah sumber daya menjadi kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan akses terhadap peluang ekonomi. Temuan lapang yang menunjukkan dominasi tingkat pendidikan SMP–SMA serta masih terbatasnya kepemilikan BPJS mengindikasikan bahwa sebagian nelayan memiliki kapasitas adaptasi yang relatif terbatas dalam menghadapi perubahan ekonomi dan spasial yang cepat. Dengan demikian, tekanan yang muncul akibat peningkatan biaya operasional tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan jangka pendek, tetapi juga berpotensi mempersempit peluang mobilitas sosial dan keberlanjutan penghidupan rumah tangga nelayan di masa depan.

Sintesis dari ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pesisir di sekitar PIK 2 tidak dapat dipahami sebagai persoalan adaptasi individual semata. Ketimpangan tersebut merupakan hasil dari proses struktural yang secara sistematis menghasilkan distribusi manfaat dan distribusi beban yang tidak seimbang antara aktor pembangunan dan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, implikasi kebijakan yang dihasilkan perlu diarahkan pada pembangunan pesisir yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial. Pengukuran dampak sosial-ekologis perlu menjadi instrumen wajib dalam setiap proyek pembangunan pesisir skala besar. Penilaian dampak tidak cukup hanya menghitung nilai lahan atau aset fisik yang terdampak, tetapi juga harus mencakup indikator operasional yang secara langsung merefleksikan dinamika nafkah nelayan, seperti perubahan ruang tangkap, jarak tempuh melaut, kebutuhan BBM per trip, perubahan hasil tangkapan, dan perubahan pendapatan rumah tangga nelayan. Pendekatan berbasis bukti seperti ini akan menghasilkan mekanisme kompensasi dan mitigasi yang lebih proporsional terhadap biaya riil yang ditanggung masyarakat pesisir.

Di sisi lain, perlindungan sosial perlu diintegrasikan sebagai bagian inheren dari kebijakan transisi pembangunan pesisir. Keterbatasan kepemilikan BPJS yang ditemukan di lapangan menunjukkan pentingnya perluasan jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja bagi nelayan, dan skema bantuan adaptif yang mampu menjangkau rumah tangga ketika terjadi penurunan pendapatan akibat perubahan eksternal. Penguatan perlindungan sosial menjadi penting karena proses transisi pembangunan sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan adaptasi ekonomi rumah tangga nelayan kecil. Kebijakan pembiayaan juga perlu dirancang lebih inklusif dengan mempertimbangkan karakteristik usaha nelayan kecil yang umumnya bersifat informal, cair, dan memiliki risiko tinggi. Muhartono et al. (2023) menunjukkan bahwa nelayan kecil di Marunda lebih banyak bergantung pada jaringan sosial dibandingkan lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan dan akses administratif. Oleh sebab itu, desain kebijakan pembiayaan perlu mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual agar dapat mendukung kapasitas adaptasi serta diversifikasi usaha masyarakat pesisir.

Selain itu, partisipasi masyarakat pesisir perlu diperkuat sejak tahap perencanaan pembangunan. Partisipasi yang bersifat substantif tidak cukup hanya menghadirkan masyarakat dalam forum konsultasi, tetapi juga memastikan bahwa suara komunitas nelayan memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang dan pemanfaatan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

wilayah pesisir. Tanpa mekanisme partisipasi yang bermakna, pembangunan pesisir berisiko terus menghasilkan enclave ekonomi modern yang terintegrasi dengan kepentingan investasi, namun terpisah secara sosial dan ekonomi dari komunitas lokal yang telah lama menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir.

Keempat arah kebijakan tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka pembangunan pesisir yang lebih berkeadilan. Pengukuran dampak sosial-ekologis menyediakan basis evidensi bagi kompensasi yang lebih proporsional, perlindungan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman dalam masa transisi, akses pembiayaan memperkuat kapasitas adaptasi ekonomi nelayan, dan partisipasi masyarakat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan untuk masyarakat pesisir, tetapi juga bersama masyarakat pesisir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, narasumber lapang, dan semua pihak yang membantu proses observasi, dokumentasi, serta penyusunan naskah ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Ilham Maulana Bagaskara berperan sebagai kontributor utama dalam konseptualisasi, pengumpulan catatan lapang, analisis literatur, pengolahan statistik deskriptif, penulisan draf, dan revisi naskah akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Adhuri, D. S., Rachmawati, L., Sofyanto, H., & Hamilton-Hart, N. (2016). Green market for small people: Markets and opportunities for upgrading in small-scale fisheries in Indonesia. Marine Policy, 63, 198–205. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.021.

Harvey, D. (2008). The right to the city. New Left Review, 53, 23–40.

Hikmah, Zulham, A., & Nasution, Z. (2018). Reklamasi di Teluk Jakarta dan perubahan sosial pada masyarakat nelayan di Cilincing Jakarta Utara. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 8(1), 1–12. https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6849.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). Produksi perikanan tangkap DKI Jakarta 2024. Portal Satu Data KKP. https://portaldata.kkp.go.id/datainsight/produksi-ikan-tangkap.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2026). Nilai Tukar Nelayan DKI Jakarta. Portal Satu Data KKP. https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/ntn/summary.

Muhartono, R., Sumarti, T., Saharuddin, S., & Koeshendrajana, S. (2023). Nelayan kecil di perkotaan: Karakteristik usaha dan jaringan sosial dalam mengakses pembiayaan di Marunda, Jakarta Utara. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 9(1), 37–48. https://doi.org/10.15578/marina.v9i1.11919.

Prabowo, H., Afandi, N. A., Dewi, M. P., & Salve, H. R. (2022). Kamal Muara and Kampung Dadap: Survival under environmental pressures. In Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021) (pp. 1703–1708). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.276.

Ramadhan, A., Firdaus, M., Wijaya, R. A., & Muliawan, I. (2016). Estimasi kerugian nelayan dan pembudidaya ikan akibat reklamasi di Teluk Jakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3168.

Robin, Kurnia, R., Soewardi, K., Setyobudiandi, I., & Dharmawan, A. H. (2018). Analisis mekanisme adaptif dan kerentanan nafkah nelayan di Teluk Jakarta (Studi kasus: Nelayan Muara Angke, Kamal Muara dan Kalibaru). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6(3), 212–219. https://doi.org/10.22500/sodality.v6i3.20371.

Roitman, S., & Recio, R. B. (2020). Understanding Indonesia's gated communities and their relationship with inequality. Housing Studies, 35(5), 795–819. https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1636002.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

Shabrina, N. (2025). The development of Pantai Indah Kapuk 2: Social inequality and eviction of Salembaran Jati residents. Cities and Urban Development Journal, 3(1), Article 5. https://doi.org/10.7454/cudj.v3i1.1041.

Tarigan, M. I., & Ferdinanto, T. (2024). Strong sustainability and ocean justice: Fostering coastal community well-being in Indonesia. Arena Hukum, 17(3), 566–587. https://repository.ubaya.ac.id/47804/.

Yusfiaka, A., Hartati, E., & Nugraha, M. C. (2020). Hubungan perubahan tata guna lahan dengan debit air limpasan pada kawasan hunian Pantai Indah Kapuk 2. Serambi Engineering, 5(1), 720–731.